

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI KOTA SEMARANG

Oleh:

Frisca Windia Harera, Drs. Zainal Hidayat, M.A.

**Departemen Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos
1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the policies of fire hazard countermeasures in Semarang city is one of the regulation made by the Government as prevention of Semarang area and tackling a fire hazard because of it is increasing and loss either materially or casualties inflicted. The role of Government in Fire Department of Semarang and the community is very important to resolve the issue. The regional government demanded, Semarang was able to complete the problems related to prevention and tackling the fire which occurred in accordance by applying the local policy number 2 Year 1994 about Countermeasures with fire rescue by seeing some aspects namely surveillance, security, the availability of facilities and infrastructure, as well as the suitability of the procedures. This research is a descriptive qualitative research with informants staff on duty fire department of Semarang and self-described community is prone to fire rescue. This research aims to analyze the process of implementation of the policy and the factors that inhibit. The theory used in this study is George Edward III, who said that the factors of restricting implementation are disposition or attitude, communication, resources, and bureaucratic structure. The results of the research show that in the implementation of policies for tackling the fire in Semarang was still hampered by weak supervision, lack of human resources, financial resources or facilities, lack of awareness, lack of socialization. So it can be concluded that the implementation of policies for tackling the fire rescue in Semarang city have not been running well and optimally.

***Keywords: Implementation, Prevention of Fire, Supervision, Resource,
People Awareness, Dissemination***

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Semarang sebagai ibukota dari Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari permasalahan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Buku Induk Kode dan Data Wilayah Tahun 2013 oleh Kementerian Dalam Negeri, Kota Semarang merupakan salah satu kota besar yang terdapat di wilayah Negara Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 1.488.035 jiwa dan luas wilayah sebesar 373,59 km². Semarang merupakan Ibu Kota Jawa Tengah yang memiliki potensi risiko rawan bencana kebakaran dengan tingkat yang relatif tinggi. Aktivitas yang terdapat di wilayah Kota Semarang pada dasarnya tidak selalu beriringan dengan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya keamanan dan keselamatan dari ancaman bahaya kebakaran.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan dinas pemadam kebakaran tahun 2016, kejadian kebakaran di Kota Semarang selama 3 tahun terakhir peristiwa

kebakaran yang paling banyak terjadi pada tahun 2015 dengan 399 kejadian kebakaran. Sedangkan frekuensi kejadian kebakaran yang paling sedikit yaitu pada tahun 2016 dengan jumlah 162 kejadian kebakaran. Kebakaran banyak terjadi pada daerah-daerah rawan kebakaran, khususnya pada pemukiman padat penduduk atau kita lebih sering menyebutnya kawasan kumuh atau pemukiman kumuh. Penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik, rokok, kompor gas dan lain-lain, dimana pemasalahan korsleting listrik adalah penyebab kebakaran tertinggi.

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2 Tahun 1994 tentang penanggulangan bahaya kebakaran memberikan dukungan dalam kegiatan pencegahan kebakaran yang selama ini terabaikan. Dengan ketentuan perda tersebut, maka pemerintah dan segenap elemen masyarakat perlu menerapkan, melaksanakan dan memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran atau setidaknya sedikit dapat mengurangi resiko yang

ditimbulkan akibat kebakaran. Setelah melihat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut, maka kegiatan pencegahan sebaiknya didukung oleh seluruh lapisan masyarakat terutama pemerintah yang berperan besar dalam merancang dan melahirkan kebijakan publik yang menjamin dan melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran.

Bentuk keseriusan pemerintah terhadap berbagai kasus kebakaran sudah terlihat berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1994 mengenai pencegahan umum disebutkan bahwa setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum. Salah satu lembaga guna menanggulangi tindak kebakaran yang dibentuk pemerintah yaitu Dinas Pemadam Kebakaran (DisDamKar) Kota Semarang. Dinas Pemadam Kebakaran (DisDamKar) Kota Semarang sebagai implementor merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam bidang

pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang meliputi pencegahan, pembinaan, penyuluhan, dan pengendalian operasional yang mengacu pada program-program yang sudah ditetapkan dalam perda No. 2 Tahun 1994 tersebut. Sebagaimana yang telah disampaikan dari data hasil pra survey yang diperoleh di atas, di kota Semarang beberapa permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan setiap tahun bencana kebakaran selalu terjadi seakan-akan menggambarkan tujuan kebijakan belum dapat dipahami oleh masyarakat serta belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perda No. 2 Tahun 1994.

Dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Semarang diharapkan jumlah kejadian kebakaran dapat menurun. Pemukiman kumuh padat penduduk yang rawan terjadi kebakaran dapat diatur dan ditertibkan guna mendukung tercapainya pelaksanaan kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan Peraturan

Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 1994.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program tersebut peneliti melakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kota Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Semarang dalam mencegah kebakaran ?
2. Apa saja faktor penghambat dari implementasi kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Semarang dalam mencegah kebakaran ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan bahaya

kebakaran di Kota Semarang dalam mencegah kebakaran.

2. Untuk menganalisis faktor penghambat dari implementasi kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Semarang dalam mencegah kebakaran.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) adalah proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik, sedangkan menurut Keban sendiri menyatakan bahwa istilah Administrasi publik menunjukkan bahwa bagaimana berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang aktif dalam mengambil sebuah langkah.

2. Kebijakan Publik

James E. Anderson dalam (Surbasono, 2013:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Sementara

menurut Thomas Dye dalam (Surbasono, 2013:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas R. Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Winarno (2004:64) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahap yang dikerjakan setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi tersebut. Implementasi kebijakan menunjukkan aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organisasi

pemerintah maupun para pihak yang telah di tentukan dalam kebijakan (Dwiyanto Indiahono, 2009: 143).

4. Model Implementasi George C. Edward III

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2008:150-154) dan Widodo (2009:96-110) ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yakni :

a. Komunikasi

Diperlukan komunikasi yang efektif antara pelaksana program kebijakan dengan kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran harus dikomunikasikan dengan baik, sehingga menghindari distorsi atas kebijakan dan program.

b. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Manusia, Informasi, Fasilitas, Anggaran).

c. Disposisi atau Sikap

Setiap kebijakan dipengaruhi oleh watak atau karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan atau program. Karakter yang harus dimiliki adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ringkas dan fleksibel akan memberi kontribusi dalam memberikan kemudahan dalam melakukan kerjasama dan koordinasi dalam proses implementasi suatu kebijakan. Hal tersebut dibagi menjadi dua indikator yaitu *Standart Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

4. Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Bencana Kebakaran

Penanggulangan kebakaran adalah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian untuk memberantas kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran, 2002). Sedangkan pencegahan kebakaran, yaitu semua tindakan yang berhubungan dengan pencegahan, pengamatan dan pemadaman kebakaran (Suma'mur, 1996).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan

dokumentasi. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Sementara analisis data dilakukan dengan metode analisis Miles dan Huberman yang langkahnya terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2009: 246).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kota Semarang

Implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Semarang belum berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Hal tersebut dapat dilihat melalui aspek-aspek, sebagai berikut :

1. Pengawasan

Cara-cara yang benar tentang pengawasan terhadap kondisi peralatan masak, peralatan elektronik, cara penyimpanan bahan kimia, dan pengelasan tidak dilaksanakan oleh

masyarakat. Pada kenyataannya masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran terutama pada banyak instalasi gas yang tidak sesuai dengan standart, ditemukan selang regulator yang sudah aus yang rawan terjadi kebocoran gas, menempatkan gas terlalu dekat dengan sumber api, dan steker ganda. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dalam melakukan pengawasan tidak mengecek langsung ke lapangan sehingga kebakaran masih juga terjadi. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran.

2. Keamanan

Ditemukan kelalaian tentang keamanan pada masyarakat yaitu pemasangan instalasi listrik, instalasi gas yang salah, merokok dan membuang putung rokok di sembarang tempat yang dilakukan oleh masyarakat. Kelalaian tersebut meliputi pemasangan instalasi gas dan listrik yang tidak sesuai dengan standart, colokan ganda, dan merokok di dekat sumber api. Pelanggaran keamanan tersebut dapat

menimbulkan bahaya kebakaran. Kelalaian tersebut diakibatkan karena masyarakat dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang tidak melakukan tindakan keamanan dalam implementasi pencegahan bahaya kebakaran. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran.

3. Ketersediaan sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana terhadap bahaya kebakaran merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Dinas Pemadam Kebakaran beserta masyarakat agar terhindar dari bahaya kebakaran. Tetapi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dan masyarakat telah melakukan kelalaian dan kekurangan dalam menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yaitu tempat pembuangan dan pembakaran sampah yang salah tidak pada tempatnya, tempat pembuangan dan penyimpanan bahan kimia yang sembarangan, kurangnya peralatan pemadam kebakaran, pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran belum terpenuhi guna meningkatkan ketrampilan petugas pemadam kebakaran,

komunikasi dan informasi serta edukasi yaitu kurangnya penyuluhan tentang mencegah dan menanggulangi kebakaran kepada masyarakat.

4. Kesesuaian prosedur

SOP sebagai pedoman yang menjelaskan prosedur pelaksanaan kegiatan operasi penanggulangan bahaya kebakaran atau acuan dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tatakerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Untuk mempermudah penanggulangan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Semarang telah menyiapkan dan melaksanakan Prosedur penanganan kebakaran Standar Operating Procedure (SOP) Pemadaman Kebakaran.

B. Faktor Penghambat dalam Implementasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kota Semarang

Faktor-faktor yang menghambat adanya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2 Tahun 1994 tersebut yang penulis uraikan sebagai berikut :

Lemahnya pengawasan merupakan bentuk sikap dari pelaksana kebijakan, maka lemahnya pengawasan adalah bentuk dari disposisi. Dengan demikian, menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan baik. Dengan kata lain, jika pengawasan dilakukan dengan baik maka kebijakan akan berjalan dengan baik. Dalam hal lemahnya pengawasan terhadap kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan teori George Edward III yang menjelaskan faktor disposisi atau sikap sebagai

pengaruh dalam implementasi suatu kebijakan. Masalah kebakaran sudah sering terjadi sehingga meninggalkan dampak kerusakan yang besar. Untuk itu, warga menuntut keseriusan pemerintah daerah mengatasinya. Tindakan pembiaran akan menimbulkan ekspresi kekecewaan mendalam masyarakat atas kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam hal ini pedagang yang rentan kebakaran. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Damkar Semarang, maka implementasi penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Semarang tidak berjalan dengan optimal sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang telah dibuat.

Kurangnya sumber daya. Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun

akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan informasi. Kendala yang ada pada aspek sumber daya manusia dalam pelaksanaan pencegahan kebakaran yang dilakukan Damkar Kota Semarang masih ditemukan kendala yaitu belum adanya rekrutmen pegawai baru sehingga masih belum sesuai dengan harapan dan belum tercapai secara maksimal. Sumber daya fasilitas yaitu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dengan keterbatasan dan kurangnya sarana dan prasarana tersebut menjadi hambatan bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sehingga implementasi penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Semarang tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Sumber daya finansial merupakan faktor yang tidak dapat

dihindari dalam mendukung implementasi kebijakan. Setiap kegiatan tentu memerlukan anggaran untuk mendukung kebijakan atau program. Namun, kenyataannya implementasi penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Semarang terkendala oleh masalah dana yang terbatas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui dana APBD. Hal ini karena alokasi dana dari pemerintah untuk pengadaan sarana dan prasarana pada kenyataannya masih kurang dan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan di Dinas Pemadam Kebakaran Semarang.

Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan faktor penghambat yang ditemukan di lapangan tidak sesuai dengan teori Edward III karena setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tergantung pada lingkungan dan kebudayaan/kebiasaan yang berbeda-beda untuk dapat diterapkan pada masyarakat. Upaya pencegahan bahaya kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Semarang ini menemui hambatan/kendala dari masyarakat

yaitu tidak memiliki kesadaran atau kepedulian terhadap penanggulangan kebakaran. Akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat, maka implementasi penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Semarang tidak berjalan dengan maksimal.

Kurangnya sosialisasi merupakan bentuk dari komunikasi yang kurang berhasil. Faktor kurangnya sosialisasi ini sesuai dengan teori George C. Edward III, menurut Edward III dalam Widodo (2011 :98) mengemukakan komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Pemahaman terkait pelaksanaan peraturan daerah Kota Semarang No. 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dalam kenyataan yang terjadi di lapangan, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang kurang mensosialisasikan aturan tersebut. Para petugas pemadam kebakaran baru akan mensosialisasikan

Peraturan Daerah tersebut apabila sudah ada masyarakat yang melakukan kegiatan atau aktivitas yang tidak boleh dilakukan karena bisa memicu kebakaran. Komunikasi yang berupa sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat masih sangat minim. Akibat kurangnya sosialisasi pada masyarakat, maka Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2 Tahun 1994 tentang penanggulangan bahaya kebakaran belum berjalan dengan baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran memiliki 4 aspek yaitu aspek pengawasan, keamanan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan kesesuaian prosedur. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kondisi-kondisi yang rentan terjadi kebakaran dan tidak berjalan sesuai

dengan kebijakan yang telah dibuat. Adapun kesesuaian prosedur pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP. Terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran yaitu lemahnya pengawasan, kurangnya sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya sosialisasi.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dapat meningkatkan dan melaksanakan pengawasan secara rutin dengan frekuensi waktu minimal 1 bulan sekali terhadap kondisi-kondisi peralatan dan bahan-bahan yang rentan kebakaran dengan cara mengecek kondisi-kondisi tersebut di masyarakat terutama masyarakat yang rentan terhadap kebakaran seperti penjual gas, toko bahan kimia, bengkel las, dan sebagainya.
2. Sumber daya terkait dengan sumber daya manusia agar dapat ditingkatkan secara kuantitas dan

kualitas dengan cara *open recruitment* pegawai secara ketat sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kesehatan fisik agar pada proses pelaksanaan kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran dapat maksimal.

3. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dengan menambah perlengkapan penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran sesuai dengan kebutuhan.

4. Pemerintah harus menyediakan dan menambah anggaran untuk memenuhi kebutuhan baik sarana dan prasarana serta kebutuhan lain guna mendukung pencegahan bahaya kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di semua kalangan agar ikut berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan keterampilan terkait pencegahan bahaya kebakaran.

6. Meningkatkan kerja sama antar Dinas Pemadam Kebakaran dengan instansi lain yaitu Dinas Pekerjaan

Umum Kota Semarang, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian Kota Semarang, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berupa forum peduli kebakaran di Kota Semarang, dan instansi-instansi terkait lainnya, Kecamatan dan Kelurahan dengan berbagai pihak swasta guna mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Semarang sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dalam sistem proteksi kebakaran.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian (edisi revisi: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
- Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi II*. Penyunting Muhadjir Darwin. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Edwards III, George C_ 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Grindle, Merilee., 1980., *"Politics and Policy Implementation In The Third World...*, New Jersey: Princetown University Press
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Irfan, Muhammad. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan*. Rajawali Press. Jakarta.
- Jones, Charles O. 1984. *Pengantar Kebijakan Publik* (terjemahan) Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Stategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mazmanian, D. A. & Paul. A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. London: Scott, Forestnan and Company.
- Moleong J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. 2007. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulles, Mathew B & A. Mi chael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications Inc.
- Nugroho. D, Riant. 2009, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi* , PT. Al ex Medi a Komputi do Kelompok Gramedia, Jakarta.
- _____, 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pasolong Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. 2012. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Purnomo, Hadi dan Ronny Sugiantoro. *Manajemen Bencana Respon dan Tindakan terhadap Bencana*. 2010. Yogyakarta: MedPress
- Ramli, Soehatman. 2010. *Manajemen Kebakaran*. PT. Dian Rakyat. Jakarta
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. 2013. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiharto, R, Nurjanah, Dede Kuswanda, Siswanto BP dan

- Adikoesoemo. 2013. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, Metode *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 2009. Bandung: Alfabeta
- Suma'mur PK, 1996. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta : CV Haji Masagung.
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 1997. *Analisis Kebijakan I*, Haji Mas Agung : Jakarta
- Wibawa, Samudra. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan dan Analisis*. Intermedia., Jakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Keffen Hutria (2013) "*Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat*" *Stia lan Bandung* **10**(3): 453-47
- Priliana Yohana, Mindarti Lely, Shobaruddin Muhammad (2015) "*Pelaksanaan Program "Kelurahan Siaga Aktif" Dalam Mewujudkan Kemandirian Masyarakat (Studi Di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)*" *administrasipublik.studentjournal.al.ub.* **3**(10): 1771-1775
- Sumber Dokumen :**
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Semarang
- Permenakertrans No. Per 04/MEN/1980 tentang *Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR*
- Data Bencana di Kota Semarang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
- Data Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013
- Kota Semarang dalam Angka 2016

Statistik Daerah Kecamatan
Pedurungan 2016

Sumber Internet :

<http://dibi.bnpb.go.id/> diakses 9-10-
15 pukul 19.30

Data tentang gambaran daerah
bencana di Indonesia

[http://beta.semarangkota.go.id/conte
nt/image/files/RENSTRA\(1\).pd
f](http://beta.semarangkota.go.id/content/image/files/RENSTRA(1).pdf) diakses 18-9-16 pukul 19.00

Gambaran Kota Semarang

[http://www.bpbd.semarangkota.go.id
/](http://www.bpbd.semarangkota.go.id/), diakses 15-11-15 pukul
14.39

Pengertian Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota
Semarang